

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan Ujian Skripsi	iii
Halaman Motto.....	iv
Pernyataan Orisinalitas.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	xii
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Metode Penelitian.....	16
1.4.1 Tipe Penelitian	16
1.4.2 Pendekatan	17
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	18
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	20
1.5 Sistematika Bahan Hukum.....	21
BAB II STATUS PENGESAHAN APBD YANG PROSESNYA MENYIMPANG DARI KETENTUAN	23

2.1	Proses Penyusunan APBD	23	
2.2	Fungsi Anggaran DPRD Dalam Pembahasan APBD	37	
2.3	APBD yang Menyimpang dari Peraturan Perundang-Undangan ..	43	
BAB III TINDAKAN KEPALA DAERAH YANG MENYUSUN APBD			
DENGAN MELANGGAR ATURAN			54
3.1	Legalitas Kebijakan Gubernur DKI Jakarta	54	
3.2	Upaya Hukum DPRD Provinsi DKI Jakarta Terkait Legalitas Kebijakan Gubernur DKI Jakarta	63	
BAB IV PENUTUP			79
4.1	Kesimpulan	79	
4.2	Saran.....	80	
DAFTAR BACAAN			



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang *Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang *Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015*

DAFTAR TABEL

- Tabel 1: Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD
- Tabel 2: Timeline Pelaksanaan Penyusunan APBD di DKI Jakarta Periode 2015

